



## WALIKOTA BATAM

Batam, 30 Juni 2021

Kepada Yth.

1. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta
2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
3. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas Umum
4. Pengurus Rumah Ibadah
5. Camat dan Lurah se-Kota Batam
6. Ketua RT/RW se- Kota Batam
7. Seluruh Masyarakat Kota Batam

di-

Batam

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 29 TAHUN 2021

**PERPANJANGAN**  
**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)**  
**BERBASIS MIKRO DAN OPTIMALISASI POSKO PENANGANAN**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BATAM**

DASAR :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
2. Hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 perihal Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kota Batam.
3. Memperhatikan peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kota Batam .

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, untuk terhindar dari penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara meluas, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 serta meningkatkan intensitas penerapan protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan.
2. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
  - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat.
  - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat.
  - 3) kegiatan keagamaan di tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai zona merah berdasarkan penetapan pemerintah daerah.
  - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial.
  - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang.
  - 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB.
  - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:
  - a. Membentuk Posko tingkat Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala Rukun Tetangga (RT).
  - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat kelurahan membentuk Posko kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
5. Posko tingkat Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
  - a. Pencegahan
  - b. Penanganan
  - c. Pembinaan
  - d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID -19 di tingkat kelurahan.

6. Dalam melaksanakan fungsi, Posko tingkat kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat kecamatan, kota, provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
7. Posko tingkat kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat kelurahan, dan kepada Posko tingkat kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.
8. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kota, yang terdiri dari:
  - a. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar toko swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - b. Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang selama jam operasional, tidak boleh melaksanakan layanan makan di tempat.
  - c. Larangan layanan makan di tempat sebagaimana dimaksud poin di atas berlaku juga untuk restoran hotel, resort dan tempat wisata (*room service*).
  - d. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
    - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB
    - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - e. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - f. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di mesjid, mushola, gereja, pura dan vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat antara lain:
    - 1) melakukan pengecekan suhu.
    - 2) memakai masker dengan benar.
    - 3) mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*.
    - 4) menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 meter dan tidak bersalaman
    - 5) melakukan disinfektan rumah ibadah secara berkala.
    - 6) membatasi jumlah kehadiran kegiatan ibadah maksimal 50% dari kapasitas ruangan.
    - 7) menggulung karpet yang biasa menjadi sajadah atau alas shalat dalam masjid/mushalla
    - 8) membawa perlengkapan ibadah berupa sajadah, mukena, kitab suci masing-masing.
    - 9) berwudhu/bersuci dari rumah.
  - g. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- h. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dibatasi dengan kapasitas maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
    - i. Untuk kegiatan hajatan kemasyarakatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan pengaturan kehadiran undangan dan tidak ada hidangan makanan di tempat.
    - j. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah.
    - k. Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, layanan vaksinasi, kegiatan *testing*, *tracing* dan *treatment* serta kegiatan pemerintah esensial lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
9. Untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19 di Kota Batam diberlakukan penerapan jam malam melalui pembatasan aktivitas malam setiap hari sejak pukul 20.00 s.d pukul 04.00 WIB. Pada pemberlakuan jam malam ditetapkan sebagai berikut:
  - a. masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah pada penerapan jam malam.
  - b. tidak melakukan kegiatan usaha pada supermarket/swalayan, retail modern, pasar tradisonal, toko kelontong, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, restoran, tempat wisata dan rekreasi, tempat olahraga, tempat usaha lainnya dan kegiatan pada area publik.
  - c. Dikecualikan bagi Satgas Penanganan COVID-19, petugas PPKM berbasis mikro dan pihak yang melaksanakan kegiatan esensial seperti kesehatan, komunikasi, teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, sektor vital, serta masyarakat yang dalam keadaan darurat.
10. Agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi oleh unsur Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain:
  - a. Melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Agar lebih mengintensifkan penegakan 5M:
    - 1) menggunakan masker
    - 2) mencuci tangan
    - 3) menjaga jarak
    - 4) menghindari kerumunan
    - 5) mengurangi mobilitasSerta melakukan penguatan terhadap 3T yaitu *testing*, *tracing*, *treatment* (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina).

- b. Mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*.
- c. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (*mall*) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19.
- d. Melakukan pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/ tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
  - 1) penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*.
  - 2) penerapan protokol kesehatan secara ketat pada fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*.
12. Seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor).
13. Instansi pemerintah, lembaga negara dan swasta yang membidangi pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
14. Surat Edaran Walikota ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 Juli 2021 s.d 14 Juli 2021** dan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan ketentuan.
15. Dengan berlakunya surat edaran ini maka Surat Edaran Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Dan Optimalisasi Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pimpinan Forkopimda se-Kota Batam